



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No. 2, 2022

ANALISIS PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENAGIHAN KREDIT UNTUK MENCEGAH KREDIT MACET PADA KOPERASI KPRI SEJAHTERA BERSAMA DINAS KOPERASI UKM KOTA MEDAN

Sri Mulyani¹, Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan²

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Indonesia

Msri72410@gmail.com¹, fadhilahahmad@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

The results showed that the credit distribution system at KPRI Sejahtera Together with the Medan City UKM Cooperative Service was adequate because the cooperative management made decisions by looking at the track records of prospective debtors and taking into account the 5C and 7P principles, but this precautionary principle has not been implemented properly. The credit collection system is carried out by means of members paying directly to the cashier or cooperative management. If members are in arrears, the management will start billing. Bad loans that occurred were caused by starting in 2018 the salaries (wages) of the Medan City SME Cooperative Service employees directly entered the employees' personal accounts so that the cooperative management could not cut the table like in previous years.

Keyword: *Credit Granting Procedures, Credit Collection Procedures, Bad Credit*

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan cukup memadai dikarenakan pengurus koperasi mengambil keputusan dengan cara melihat rekam jejak calon debitur serta melakukan pertimbangan prinsip 5C dan 7P, tetapi prinsip kehati-hatian ini belum dijalankan seperti yang diharapkan. Untuk prosedur pengihan kredit dilakukan dengan cara anggota membayar langsung ke kasir atau pengurus koperasi apabila anggota melakukan tunggakan maka pengurus akan mulai melakukan penagihan, langkah terakhir yang dilakukan pengurus untuk menagih tunggakan dengan cara menyurati yang bersangkutan dan tembusan kepada pimpinan. Kredit macet yang terjadi disebabkan dimulai sejak 2018 gaji (upah) pegawai Dinas Koperasi UKM Kota Medan langsung masuk rekening pribadi pegawai sehingga pengurus koperasi tidak dapat melakukan *potong meja* seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kata Kunci : *Prosedur Pemberian Kredit, Prosedur Penagihan Kredit, Kredit Macet.*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No.25 (Itang, 2016) “Koperasi ialah suatu lembaga bisnis yang terdiri dari orang seorang atau elemen hukum yang membantu dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pedoman yang bermanfaat serta pengembangan keuangan kelompok berdasarkan aturan kekeluargaan”.

Menurut (Itang, 2016) di dalam aspek usaha perbedaan koperasi dengan non-koperasi dapat dilihat dari tujuannya bahwa koperasi bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, tapi berusaha untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan anggotanya. Sedangkan non-koperasi tujuan utamanya ialah mencari laba setinggi-tingginya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi memegang peranan penting untuk ekonomi, untuk lebih spesifik sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengambil aset dari daerah setempat atau anggota secara benar-benar dan produktif menuju peningkatan harapan untuk kenyamanan sehari-hari masyarakat. Aktivitas mendasar koperasi adalah mendapatkan simpanan dari perorangan sebagai dana cadangan dan mengedarkannya kembali kepada perorangan.

Jenis usaha yang bisa dilakukan koperasi sangat banyak salah satunya ialah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dibidang mengolah simpanan/tabungan dari anggotanya, kemudian meminjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan tambahan modal. Dalam pemberian pinjaman koperasi harus mampu memberikan prosedur yang mudah dipahami oleh para anggotanya. Jika prosedur pemberian kredit tidak dijalankan dengan baik maka kemungkinan akan menimbulkan kredit macet sehingga dapat mengurangi pendapatan atau penerimaan kas.

Ketika koperasi akan memberikan pinjaman kepada individu, yang memberikan pinjaman harus mempertimbangkan dan melakukan investigasi kredit untuk menghindari kerugian di kemudian hari. Sebelum individu memperoleh pinjaman, anggota harus melalui tahap penilaian, mulai dari mengajukan permohonan kredit hingga pemberian kredit. Apabila segala prosoder sudah dilakukan oleh anggota maka anggota layak untuk mendapatkan kredit, langkah selanjutnya yang harus diperhatikan koperasi ialah proses kelancaran pembayaran anggota atas kredit tersebut. Apabila saat pembayaran kredit terjadi tunggakan atau kelambatan pembayaran, persyaratan untuk prosedur pemilihan kredit yang diharapkan dapat mencegah kredit buruk.

Menurut (Sinaga et al., 2016) Peristiwa non-performing advances atau non-performing credits adalah pertaruhan adalah risiko yang melekat dalam setiap kredit yang diberikan oleh koperasi kepada perseorangannya. Risiko itu berbentuk situasi dimana pinjaman dikembalikan tidak tepat waktu. Semakin menonjol masalah kredit yang terjadi di koperasi, maka kondisi keuangan koperasi juga akan semakin menurun.

Berikut adalah keadaan piutang tak tertagih KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan dari Tahun 2017-2020 :

Tabel 1.1
Jumlah Kredit dan Total Piutang Tak Tertagih Pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Kredit (Rp)	Total Piutang Tak Tertagih (Rp)	Persentase Total Piutang Tak Tertagih dan Jumlah Kredit (%)
2017	1.367.345.000	0	0
2018	1.652.900.000	3.516.000	0,21
2019	1.595.570.000	15.805.000	0,99
2020	1.768.157.400	159.880.000	9,04

Sumber: RAT KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan (Data Diolah)

Sesuai tabel 1.1 di atas sangat baik dapat dilihat bahwa jumlah uang pinjaman secara umum akan meningkat dari satu tahun ke tahun lainnya. Angka pinjaman terkecil terdapat di tahun 2017 yang berjumlah Rp1.367.345.000-, dan jumlah kredit tertinggi berada di tahun 2020 berjumlah Rp1.768.157.400-, artinya mengalami kenaikan jumlah kredit sebesar 77%. Sedangkan untuk piutang tak tertagih pada tahun 2017 tidak ada piutang yang tak tertagih atau Rp0-, dari hasil analisis penelitian hal ini dikarenakan pada tahun 2017 prosedur pemberian gaji karyawan masih secara langsung tanpa perantara rekening bank sehingga pihak koperasi yang mengikat bagian keuangan menjadi karyawan koperasi bisa langsung memotong dari slip gaji anggota koperasi atau istilahnya biasa disebut *potong meja*, sedangkan piutang tak tertagih tertinggi ada di tahun 2020. Pada tahun tersebut terjadi lonjakan tunggakan sebesar 1000% yaitu berjumlah sebesar Rp159.880.000-, hal ini dikarenakan pembayaran kredit tidak bisa lagi dipotong melalui gaji anggota dikarenakan anggota menerima gaji melalui rekening Bank yang langsung ditransfer ke rekening pribadi anggota.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan riset terhadap koperasi tersebut dengan judul “Analisis Prosedur Pemberian dan Penagihan Kredit Untuk Mencegah Kredit Macet Pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan”.

KAJIAN LITERATUR

Prosedur Akuntansi

Menurut (Sari & Fitriatuti, 2017), akuntansi adalah prosedur informasi yang mengukur aktivitas perusahaan, pengolahan data dalam laporan dan mengkomunikasikan hasil kepada pengambil keputusan. Saat menerapkan prosedur akuntansi, prosedur akuntansi yang dirancang seringkali tidak sesuai dengan operasi sesungguhnya yang dijalankan oleh perusahaan. Perbedaan antar prosedur akuntansi yang dirancang dengan peristiwa sesungguhnya dalam operasi sehari-hari perusahaan sering diselesaikan melalui kebijakan manajemen sebagian tanpa disempurnakan terhadap desain prosedur akuntansi yang ada secara keseluruhan sehingga lama kelamaan prosedur akuntansi tersebut diterapkan untuk membantu operasional perusahaan seringkali sangat jauh berbeda dengan desain sebelumnya. Kondisi ini mendorong penurunan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan operasinya dan menghasilkan informasi yang dihasilkan. Selama empat dekade terakhir konsep akuntansi telah mengalami banyak perkembangan. Perkembangan diawali dengan berkembangnya konsep prosedur (pendekatan prosedur) yang dipelopori oleh ahli-ahli sosial yang pada saat itu sedang mempelajari ilmu sosial dan organisasi serta didorong oleh perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

Menurut (Mulyadi, 2010), Target keseluruhan dari pengembangan kerangka pembukuan adalah:

1. Untuk memberikan data kepada administrasi latihan bisnis baru.
2. Membantu mengembangkan lebih lanjut data yang dibuat oleh kerangka kerja saat ini, baik dalam hal kualitas, ketepatan tampilan, dan konstruksi data.
3. Untuk lebih mengembangkan kontrol pembukuan dan pemeriksaan interior, khususnya untuk bekerja adil dan jujur dari kualitas data pembukuan yang tak tergoyahkan dan untuk memberikan catatan total sehubungan dengan kewajiban dan jaminan sumber daya organisasi.
4. Mengurangi biaya administrasi sesuai dengan pembukuan.
5. Menurut (Mulyadi, 2010), komponen kerangka pembukuan utama adalah sebagai berikut: Struktur, jurnal, buku besar, Catatan Tambahan, Laporan.

Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperative. Co artinya bersama-sama, sedangkan operation berarti usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, secara etimologis koperasi dapat diartikan sebagai bersama-sama untuk mencapai tujuan.

Sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh para pakar di dalam buku (Itang, 2016)

sebagai berikut :

1. Menurut Dr. Winardi, SE Bahwa koperasi adalah sejenis badan usaha dimana ada satu hak suara per anggota, terlepas dari berapa banyak uang yang dimasukkan olehnya ke badan usaha tersebut.
2. Menurut Prof. Dr. Syamsudin Mahmud Bahwa koperasi ialah berupa hubungan individu yang didasarkan pada keseimbangan sebagai manusia tanpa perbedaan antar agama atau politik secara sukarela masuk untuk memenuhi kebutuhan materi bersama atas tanggung jawab bersama.
3. Menurut Roelijan Soedarsono, dkk. Koperasi adalah kelompok yang memungkinkan orang-orang bekerja secara sukarela untuk mengatur produksi, pembelian dan penjualan barang atau jasa, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Menurutnya (Itang, 2016), pada dasarnya koperasi terbagi menjadi 3 bagian, yakni koperasi konsumsi, koperasi kredit dan koperasi produksi. Di dalam koperasi konsumsi mekanisme kerjanya adalah mengumpulkan barang dari pihak lain, misalnya dari pedagang/produsen langsung, kemudian dijual/dialurkan kepada para anggota. Dan di dalam koperasi kredit mekanisme kerjanya, koperasi dalam memberikan pinjaman atau kredit memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri. Dari uang simpanan yang dikumpulkan itu diberikan pinjaman kepada anggota yang memerlukan bantuan atau yang membutuhkan bantuan ekonomi. Sedangkan di dalam koperasi produksi mekanisme kerjanya, mengumpulkan peralatan pengolahan dan proses produksi, memajukan teknik produksi dan akhirnya memasarkan produk atau lainnya kepada para anggota ataupun dapat dipasarkan kepihak luar yang membutuhkan.

Kredit

Menurut (Putra & Saraswati, 2020) asal awalnya "kredit" berasal dari bahasa Yunani "credere" yang berarti keyakinan akan kebenaran dalam praktik sehari-hari. Kepercayaan disini artinya bagi yang memberi kredit adalah bahwa dia percaya pada penerima kredit bahwa kredit yang dicairkan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian, sedangkan bagi penerima kredit adalah penerimaan kepercayaan sehingga memiliki kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut (Kasmir, 2010) tidak jauh berbeda bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu persetujuan atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai bunga.

Menurutnya fungsi-fungsi kredit antara lain :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Untuk meningkatkan daya guna barang
4. Meningkatkan peredaran barang
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Prosedur Pemberian Kredit

(Putra & Saraswati, 2020), mendefinisikan bahwa sebelum debitur mendapat kredit, ia harus terlebih dahulu melalui tahapan penilaian mulai dari pengajuan proposal kredit dan dokumen-dokumen yang diperlukan, pemeriksaan keaslian dokumen, analisis kredit hingga kredit dicairkan. Tahapan dalam memberikan kredit ini kita kenal dengan nama prosedur pemberian kredit atau prosedur pemberian kredit. Menurut tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk

memastikan kelayakan kredit diterima atau ditolak.

Secara umum prosedur pemberian kredit menurut badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Penilaian kelayakan kredit
4. Wawancara pertama
5. Peninjauan ke lokasi
6. Wawancara kedua
7. Keputusan kredit
8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
9. Realisasi kredit

Prosedur Penagihan Kredit

Resiko yang terkandung disetiap pemberian kredit oleh koperasi ialah tunggakan atau kelambatan pembayaran. Tunggakan muncul dikarenakan anggota yang secara sengaja ataupun tak sengaja tidak mengembalikan kredit secara tepat waktu. Apabila tunggakan sudah terjadi maka perlu adanya prosedur penagihan untuk mencegah masalah keuangan koperasi. Manfaat dilakukan penagihan untuk menginformasikan dan mengingatkan pihak-pihak yang tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada pihak penagih.

Kredit Macet

Menurut (Kasmir, 2010), piutang bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang di dalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua komponen, yaitu dari pihak bank dalam menganalisis dan dari nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam komitmennya untuk tidak melakukan angsuran sebagaimana mestinya.

Dan di dalam buku edisi yang berbeda (Kasmir, 2008) mengatakan, bahwa keterlambatan dalam pengembalian piutang dikarenakan oleh dua penyebab :

1. Dari sisi interior, pihak penyidik kredit kurang teliti dalam memeriksa keabsahan arsip atau kesalahan dengan proporsi yang ada, bisa juga pemeriksaan kredit yang melakukan penyidikan secara berprasangka buruk.
2. Dari klien (anggota)
 - a. Ada sebuah komponen rencana
 - b. Komponen kebetulan

Dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah pinjaman yang mengalami kesulitan oleh debitur untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama antara kreditur dan debitur karena faktor yang disengaja atau tidak sengaja. Kredit bermasalah akan mengakibatkan kerugian koperasi, yaitu kerugian karena tidak diterimanya dana yang telah dicairkan, atau pendapatan bunga yang tidak dapat diterima.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Di mana teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana prosedur pemberian serta penagihan kredit pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan yang kemudian informasi tersebut akan dijadikan landasan dalam mengatasi kredit macet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Prosedur Pemberian Kredit KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa prosedur pemberian kredit pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan diawali dengan kedatangan anggota (calon peminjam) untuk memberikan surat permohonan kredit ke bagian kredit. Bagian kredit akan

membuat resume berupa berapa jumlah simpanan anggota dan sisa pinjaman ditahun-tahun sebelumnya. Hasil resume tersebut akan diteruskan ke sekretaris koperasi kemudian diteruskan ke ketua koperasi untuk pengambilan keputusan kredit. Apabila ketua dan sekretaris sudah setuju maka bendahara dapat mencairkan kredit yang diajukan.

Jika dalam pengambilan keputusan pencairan kredit ketua dan sekretaris koperasi silang pendapat maka ketua, sekretaris dan bendahara akan melakukan rapat untuk mempertimbangkan kembali. Hal yang akan dipertimbangkan oleh pengurus ialah prinsip 5C dan 7P tetapi prinsip kehati-hatian ini belum diterapkan dengan baik.

Pemeriksaan 5C meliputi karakter, kapasitas, modal, kondisi, keamanan (jaminan) telah terpenuhi, namun penilaian 7P hanya mencakup karakter, motivasi di balik pengajuan kredit, pengembalian kredit. Hal ini dikarenakan koperasi hanya mempertimbangan latar belakang hidup calon penerima kredit dan melihat kembali rekam jejak pembayaran calon penerima kredit sebelumnya.

Prosedur pemberian kredit KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Calon penerima kredit melakukan pengajuan permohonan kredit ke bagian kredit.
- Bagian kredit akan membuat resume sebagai acuan pengurus dalam pengambilan keputusan.
- Mengejar pilihan kredit yang terkait dengan berapa banyak kredit yang diterima, biaya pembiayaan, rencana pembayaran yang dijadwalkan secara teratur, dan persyaratan di muka.
- Pemberian kredit dilakukan oleh penyandang dana dengan asumsi bahwa pilihan kredit didukung oleh Ketua dan Sekretaris.

Analisis Prosedur Penagihan KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan

Setiap peminjaman yang dilakukan dari tanggal 01 sampai tanggal 25 maka pembayaran akan langsung dilakukan dibulan berikutnya yaitu dari tanggal 01 sampai tanggal 25. Apabila pihak penerima kredit telat melakukan pembayaran di atas tanggal 25 maka akan dimasukkan ke dalam daftar tagihan. Sedangkan pinjaman yang dilakukan di atas tanggal 25 maka pembayarannya akan dilakukan dua bulan setelahnya.

Prosedur penagihan kredit pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan adalah pada saat tanggal pembayaran yaitu dari tanggal 1-25, pihak penerima kredit melakukan pembayaran secara langsung (pribadi) kepada pengurus koperasi. Termasuk anggota yang sudah pensiun dan pegawai yang pindah ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) jika gajinya masih ada pada Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Sementara jika yang bersangkutan pindah gajinya maka sisa hutang/pinjaman maksimal 2 kali simpanan, sisanya harus dilunasi pada saat pindah gaji. Untuk anggota yang sudah meninggal dunia maka sisa pinjamannya akan ditanggung oleh dana resiko yang sudah disediakan oleh pihak koperasi. Jumlah yang akan dikeluarkan dari dana resiko sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta), apabila sisa hutang/pinjaman yang bersangkutan melebihi jumlah yang ditanggung dana resiko maka langkah yang akan di lakukan pihak koperasi ialah melakukan pendekatan dengan ahli waris dengan menunjukkan kartu bukti angsuran anggota.

Prosedur penagihan tunggakan pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan dapat dijelaskan :

1. Peninjauan tunggakan piutang oleh Bendahara yang sesuai dengan catatan hutang/pinjaman anggota untuk diserahkan kepada Ketua.
2. Pengurus akan mulai melakukan penagihan terhadap yang bersangkutan.
3. Saat RAT (Rapat Akhir Tahun) pengurus akan membacakan nama-nama pihak penerima kredit yang melakukan tunggakan, menurut pengurus hal ini dapat mengenakan sanksi sosial kepada yang bersangkutan yaitu rasa malu.

- Langkah terakhir yang dilakukan pengurus ialah menyurati yang bersangkutan dan tembusan kepada pimpinan, namun hal ini belum pernah dilakukan oleh pengurus.

Analisis kredit macet/bermasalah pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan

Terjadinya tunggakan pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan yang menyebabkan kredit macet dimulai pada tahun 2018 dan mengalami lonjakan tunggakan 1000% ditahun 2020. Hal ini disebabkan karna dari tahun 2018 sampai tahun 2020 pegawai mendapatkan gaji melalui transfer dari Bank ke rekening pribadi masing-masing, sehingga pihak koperasi tidak bisa melakukan pemotongan kredit pinjaman secara langsung (potong meja) seperti ditahun-tahun sebelumnya. Sehingga dalam proses pembayaran angsuran pinjaman pihak penerima kredit (debitur) akan membayarkan lasnung secara pribadi kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur) yaitu pengurus koperasi.

Evaluasi Prosedur Pemberian Kredit pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan

Prosedur pemberian kredit yang tepat sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan koperasi karna prosedur pemberian kredit yang tepat dapat mencegah terjadinya tunggakan atau kredit macet. Menurut (Itang, 2016), tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Dalam hal pemberian kredit/pinjaman KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan sudah cukup memadai dan dapat dijadikan koperasi percontohan dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha yang sehat. Hal ini dapat di lihat bahwa KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi melakukan kegiatan pemberian kredit dengan cara melihat dari jumlah simpanan anggota, jumlah gaji (nafkah) anggota dan melihat dari rekam jejak pembayaran anggota dari pinjaman sebelumnya. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan pihak penerima kredit tidak melakukan tunggakan pada waktu pembayaran. Upaya yang harus di lakukan koperasi agar debitur tidak melakukan tunggakan ialah dengan memberikan batasan pemberian pinjaman sesuai dengan rekam jejak pembayaran angsuran debitur sebelumnya. Akan tetapi, KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan perlu melihat kembali 7P prinsip-prinsip pemberian kredit agar dapat dijalankan keseluruhan agar dapat mencegah terjadinya penunggakan dan menyebabkan kredit macet.

Dalam hal prosedur akuntansi atau apa mengenai pendokumentasian, KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan sangat memuaskan, hal ini terlihat dari adanya pembukuan, kapasitas, arsip dan arsip yang digunakan dalam pemberian kredit. Selanjutnya terdapat pembagian kapasitas dan adanya persetujuan arsip yang dilakukan oleh masing-masing kapasitas.

Evaluasi Prosedur Penagihan Kredit KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan

Prosedur penagihan kredit pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan dengan cara debitur secara pribadi langsung membayar angsurannya ke kasir koperasi, apabila ada tunggakan maka pengurus akan melakukan tagihan secara langsung kepada debitur. Akan tetapi, cara ini masih kurang tepat dibuktikannya dengan lonjakan tunggakan kredit yang sangat signifikan. Upaya yang dapat di lakukan pengurus ialah apabila sudah 3 kali ditagih belum juga dibayar maka pengurus langsung menyurati yang bersangkutan dan tembusan kepada pimpinan. Selain itu untuk menjaga kelancaran pengembalian angsuran pinjaman, baiknya pihak KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan segera menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Bank yang menyalurkan gaji para anggota koperasi, sehingga angsuran pinjaman

anggota dapat dipotong langsung dan ditransfer ke rekening bank koperasi.

Evaluasi Kredit Macet pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan

Kredit macet terjadi dikarenakan seorang debitur yang tidak dapat melunasi cicilan hutangnya beserta bunga yang telah dijanjikan oleh kedua pihak dalam perjanjian pinjaman. Masalah ini timbul karena di tengah masa cicilan, debitur tidak memiliki dana cukup untuk melunasinya. Hingga akhirnya mengalami pemangkiran, penundaan, permintaan perpanjangan dan sebagainya. Pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan, awal mula terjadinya disebabkan pemberian gaji (nafkah) tidak lagi secara langsung melainkan ditransfer langsung ke rekening pribadi pegawai sehingga pengurus koperasi tidak bisa memotong langsung angsuran pinjaman anggota.

Prosedur pemberian dan penagihan yang sudah berjalan harus tetap ditinjau kembali. Dimana dalam kerangka tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan yang dapat merusak pelaksanaan fungsional koperasi. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain tidak tepat dalam melakukan pemeriksaan kredit dalam memberikan kredit dan adanya debitur/individu yang dengan sengaja atau tidak sengaja tidak mempunyai keinginan untuk membayar kelebihan uang muka kepada koperasi, sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan pihak koperasi.

Untuk menghindari bertambahnya kredit macet yang mengakibatkan permasalahan terhadap kelancaran keuangan koperasi sebaiknya pihak KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan menaikkan Tanggungan Dana Resiko atau membuka asuransi pertanggungan pinjaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui prosedur pemberian dan prosedur penagihan kredit untuk mencegah kredit macet pada KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi UKM Kota Medan menunjukkan bahwa prosedur pemberian yang mereka terapkan cukup memadai dibuktikan dengan digunakannya prinsip kehati-hatian 5C dan 7P, walaupun prinsip kehati-hatian tersebut belum diterapkan secara keseluruhan. Sedangkan untuk prosedur penagihan kredit KPRI Sejahtera Bersama Dinas Koperasi Kota Medan mengalami kesulitan dikarenakan pengurus koperasi tidak dapat bekerja sama lagi dengan bagian keuangan untuk melakukan potong meja seperti yang dilakukan sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan tunggakan kredit mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun

DAFTAR LITERATUR

- Itang. (2016). Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Kasmir.. (2008).. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Edisi Revi). Rajawali Pers.
- Kasmir. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Revisi). PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyadi. (2010). *Prosedur Akuntansi* (Edisi Ketu). Salemba Empat.
- Putra, A., & Saraswati, D. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. In *CV. Jakad Media Publishing*.
- Sari, D. M., & Fitriatuti, T. (2017). Dasar Akuntansi-Pemahaman Konsep dan Praktek. In *Mulawarman University Press* (Vol. 53, Issue 9).
- Sinaga, N. H., Nainggolan, P., Siregar, L., & Jubi. (2016). Analisis Prosedur. Pemberian Dan Penagihan Kredit Untuk Mencegah Kredit Bermasalah Pada Koperasi Simpan Pinjam Guru/Pegawai "Sejahtera" Perguruan Tamansiswa Cabang Pematangsiantar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://www.financial.ac.id/index.php/financial/article/view/30>